

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah Negara yang telah merdeka dan diakui kemerdekaannya secara *de fact* dan *de jure* oleh dunia, *de facto* adalah pengakuan terhadap kemerdekaan suatu Negara secara fakta atau kenyataan yakni di buktikan dengan terpenuhinya adanya syarat sah suatu Negara yaitu terdapatnya beberapa unsur-unsur, “(1) Rakyat, (2) Wilayah, (3) Pemerintah”.<sup>1</sup> sedangkan *de jure* adalah pengakuan terhadap kemerdekaan suatu Negara secara resmi secara hukum oleh Negara lain, atau biasa di sebut dengan pengakuan secara internasional terhadap suatu Negara atas kemerdekaannya.

“Negara Indonesia telah diakui secara *de jure* pada masa awal kemerdekaannya, pengakuan secara *de jure* pertama kali di berikan oleh Negara Timur Tengah, yakni Negara Palestina dan Mesir dan di lanjut dengan Negara Syiria, Iraq, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia dan Afghanistan”<sup>2</sup>.

Dalam hal ini telah dicatat bahwa kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat, 17 Agustus 1945. Prosesi kemerdekaan Negara Indonesia yaitu dengan dibacakannya Teks Proklamasi oleh Soekarno dan Moh. Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>1</sup> Soeharto, “*Buku Ajar Negara Dan Masyarakat Sipil*” Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016, hal. 17.

<sup>2</sup>Hananti Akhyari, [www.goodnewsfromindonesia.id](http://www.goodnewsfromindonesia.id) “*Inilah Negara Pertama Yang Megakui Kemerdekaan Indonesia*”, Selasa, 19 Juli 2016 08.06 wib. diakses pada Rabu, 06 September 2017, 22.00.

ke I Indonesia yang selanjutnya di rayakan setiap tanggal 17 Agustus sebagai bentuk penghormatan terhadap para pejuang yang telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Negara Indonesia dari para penjajah Jepang dan Belanda.

Unsur-unsur Negara yang terdiri dari (1) Rakyat, (2) Wilayah, (3) Pemerintah yang mempunyai makna :

Pertama, Rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu persamaan dan yang sama-sama mendiami suatu wilayah tertentu<sup>3</sup>. Menurut Prof. Mirriam Budiarjo setiap Negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan Negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini maka perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, *homogenitas*, dan masalah nasionalisme<sup>4</sup>. Seperti pendapat Ibnu Abi Rabi' "manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, sehingga mereka saling memerlukan. Hal itu mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di satu tempat<sup>5</sup>. tempat tersebut juga bisa diartikan sebagai wilayah.

Kedua, Wilayah dalam sebuah Negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada Negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas<sup>6</sup>. Menurut Prof. Mirriam Budiarjo "setiap Negara menduduki tempat tertentu di muka

---

<sup>3</sup> Soeharto, *Loc. Cit*, hal 17.

<sup>4</sup> Budiarjo Mirriam, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*" PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal. 52

<sup>5</sup> Huda Ni'matul, "*Ilmu Negara*" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014 Hal 49.

<sup>6</sup> Soeharto, *Loc. Cit*. hal 17.

bumi dan mempunyai perbatasan tertentu, kekuasaan Negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya<sup>7</sup>.

Ketiga, Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan Negara. Oleh karenanya, Pemerintah seringkali menjadi personifikasi sebuah Negara<sup>8</sup>. Sedangkan menurut Prof. Mirriam Budiarjo “setiap Negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya, keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain”<sup>9</sup>.

Dalam kurun usia yang ke-72 tahun ini, Negara Indonesia telah merdeka namun Negara Indonesia masih dalam kondisi berkembang padahal Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi Negara *Super Power* (Negara Adi Daya) karena telah didukung beberapa faktor elemen kekuatan, baik elemen kekuatan secara nyata (*tangible power*) dan elemen kekuatan tidak nyata (*intangibile power*), didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang banyak, sehingga untuk memajukan Negara Indonesia salah satu unsur Negara yakni rakyat (masyarakat) sangat berpengaruh terhadap kemajuan Negara Indonesia, karena populasi masyarakat merupakan sebuah *elemen power is tangible* (kekuatan Negara yang nyata) dengan asumsi semakin banyak rakyat atau penduduk di sebuah Negara,

---

<sup>7</sup> Budiarjo Mirriam, *Op. Cit.* Hal. 51.

<sup>8</sup> Soeharto, *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> Budiarjo Mirriam, *Op. Cit.* Hal. 53.

Negara tersebut akan menjadi kuat, jikalau rakyat tersebut dapat dikelola dengan baik.

Salah satu bentuk pengelolaannya adalah rakyat bisa memiliki rasa cinta terhadap Negaranya. Akan tetapi, Saat ini Negara Indonesia justeru sedang mengalami krisis rasa cinta terhadap negara (Nasionalisme) pada individu-individu Warga Negaranya, serta banyaknya organisasi-organisasi yang melakukan makar terhadap Negara Indonesia dan ingin mendirikan Negara yang bersyariat Islam atau Khilafah Islamiyah (*imperium islam transnasional*) padahal Negara Indonesia merupakan Negara yang telah sah baik secara hukum manusia dan hukum syariat. Contohnya adalah HTI (Hizb Tahrir Indonesia).

Dengan banyaknya warga negara dan organisasi-organisasi yang melakukan makar terhadap Negara, itu merupakan suatu kemunduran sejarah yang sangat luar biasa, karena ratusan tahun yang lalu (yang terdekat adalah kejadian DI/TII Kartosuwiryo yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia pada zaman Soekarno) tokoh ulama khususnya Walisongo telah begitu paham bagaimana menjalani hidup di tengah masyarakat yang *plural*, termasuk *pluralitas* agama yang sangat *sensitive* sekalipun, maka dari itu seharusnya Negara dapat menjadikan hal tersebut suatu bentuk evaluasi terhadap Negara. Pertama, evaluasi untuk bisa menumbuhkan kembali rasa cinta pada hati warga negaranya (rakyat) terhadap Negara Indonesia. Kedua, evaluasi terhadap Negara yakni karena kegagalan Negara dalam mengelola sistem politik (Demokrasi) dan ekonomi (kapitalisme) yang tengah berlangsung

(Gatra)<sup>10</sup>. 3. Kehadiran Negara di dalam keagamaan, meskipun Negara Indonesia bukan Negara Agama tapi Indonesia merupakan Negara yang mengakui Agama, sehingga sangat perlu kehadiran kepada Agama seperti berkunjung ke Pondok Pesantren, mendukung Majelis Taklim atau gerakan agama yang Pro nasionalisme.

Mengingat rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 260 juta jiwa merupakan asset yang sangat besar untuk bisa memajukan Negara Indonesia, maka dari itu negara harus mampu mengelola rakyat sebanyak itu sehingga terjadi hubungan atau *integrasi* yang baik antara Negara dan rakyat untuk mencapai cita-cita bersama. “Tujuan Negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga *intervensi* pihak-pihak asing<sup>11</sup>”.

Menurut Harold J. Laski: “Negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. masyarakat merupakan Negara kalau cara hidup yang harus di taati oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat” (*the state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together*

---

<sup>10</sup> Setiawan Zudi, “*Nasionalisme NU*”, CV. Aneka Ilmu, Semarang 2007, hal 178.

<sup>11</sup> Ubaedillah A & Rozak Abdul, “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*” Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN syarif Hidayatulloh, Jakarta, 2006, hal. 26.

*for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon them all)*<sup>12</sup>.

Selain definisi diatas, Negara juga diartikan sebagai tanah air, seperti dalam hadits

الْوَطَنُ الْأَصْلِيُّ هُوَ مَوْلِدُ الرَّجُلِ وَالْبَلَدُ الَّذِي هُوَ فِيهِ

(*al wathonu al Ashley huwa maulidurrojulli wal baladil ladzi huwa fihi*)

artinya “*al wathon al Ashley* adalah tempat kelahiran seseorang dan Negeri dimana dia tinggal didalamnya” (Lihat Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani, *At-Ta`rifat*, Beirut, Darul Kitab Al-‘Arabi, cet ke-1, 1405 H, halaman 327)<sup>13</sup>.

Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh: “pada dasarnya Negara harus dicintai karena ia tempat tinggal dimana terdapat makanan, warga negara dan seluruh keluarga, ia wadah hak-hak dan kewajiban sebagai inti kehidupan politik, dan merupakan kebutuhan nyata, ia tempat menisbatkan diri yang bisa mulia, terjajah dan terhina. Sebagian orang tetap berusaha menghilangkan motto kebangsaan dari warga Negara Mesir untuk dibodohi dan dihina. Tapi, kita tetap memiliki eksistensi nasional, sekalipun mereka tidak menghendaki”<sup>14</sup>.

Maka dari itu sudah semestinya bagi setiap warga negara (rakyat) untuk dapat mencintai Negeranya sendiri dan wajib membelanya. Rakyat Indonesia yang

<sup>12</sup> Budiarto Mirriam, *Op. Cit.* hal. 48.

<sup>13</sup> Ramdhan Mahbub Maafi, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) “Ketika Hukum Syariat Islam Bicara Cinta Tanah Air” Kamis, 11 Agustus 2016, 21.01 diakses Rabu, 06 september 2017, 22.44.

<sup>14</sup> Rasyid Fauzan Ali, “*Perbandingan Fiqih Siyarah*”, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, hal. 119.

mayoritas merupakan beragama Islam (muslim) seharusnya mampu mencintai dan membela Negara Indonesia seperti yang telah dikatakan oleh Muhammad Abduh pada paragraph sebelumnya, jadi kedua hal tersebut (cinta negara dan bela negara) merupakan serangkaian yang mana jika telah mencintai negara pasti akan membela negaranya. Berbicara mengenai cinta tanah air dan bela negara dari dahulu (sebelum merdeka) sampai sekarang masyarakat muslim sangat berperan besar terhadap Negara Indonesia terutama para kyai dan ulama-ulama, para kyai ikut berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan Negara Indonesia, contoh KH. Wahab Hasbulloh Dan KH. Hasyim 'Asyari, KH. Wahab Hasbulloh yang terkenal dengan lirik syairnya "يا اهلا الوطن" "*ya ahlal wathon*" sedangkan KH. Hasyim 'Asyari dengan fatwanya "حب الوطن من الإيمان" (*huubbul wathon minal iman*) artinya mencintai tanah air sebagian daripada iman<sup>15</sup>»

Jadi, efek atau akibat dari seseorang yang mencintai tanah air (nasionalisme) yaitu mereka akan bersedia untuk membela negaranya, namun seringkali mengartikan bahwa wajib militer dan bela negara merupakan satu kesamaan padahal berbeda, pengertian bela negara berbeda dengan wajib militer. menurut Mayjen TNI Markoni: "pendidikan bela negara adalah bagaimana mendorong rakyat cinta pada negaranya. Rakyat akan dikenalkan dengan sejarah negara, pahlawan, dan sebagainya sehingga akhirnya rakyat punya kebanggaan terhadap negara". Markoni meminta pendidikan bela negara tidak dipandang apriori karena, semata-mata ini bukan tujuan untuk

---

<sup>15</sup> Niam Mukafi, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) "Hubbul Wathon Minal Iman, Jargon Pertahankan NKRI", Senin, 13 Maret 2017, 11.45 diakses pada Rabu, 13 September 2017, 22.44

wajib militer. "ini tidak semata-mata ada wajib militer, ini adalah bagaimana kalau terjadi suatu saat nanti, jika ada bela negara, karena sistem pertahanan kita adalah rakyat semesta<sup>16</sup>".

Akhir-akhir ini kementerian pertahanan membuat program pendidikan bela negara yang di aplikasikan melalui pemberian materi atau pendidikan, Mayjen TNI Markoni selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI sangat mengapresiasi program yang di lakukan oleh Kementerian Pertahanan (KemHan), dan menurutnya program bela negara itu sudah cukup tidak perlu di adakan wajib militer.

Selain dari kementerian pertahanan yang membuat program bela Negara terdapat pula salah satu organisasi islam yakni organisasi JATMAN (Jam'iyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdiyyah) juga sangat getol untuk menggelorakan nasionalisme (cinta tanah air) sehingga anggota organisasi JATMAN sangat membela negaranya, salah satu bukti organisasi JATMAN getol dalam menggelorakan nasioalisme yaitu dengan mengadakan kegiatan "Konferensi Internasional Ulama" dengan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan nasionalisme seperti tentang "Bela Negara" yang digelar bersama Kementerian Pertahanan (KemHan). Konferensi tersebut telah diadakan 2 kali pada tahun 2016 silam yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli, serta telah diadakan pula pada tahun 2018 tepatnya 14-18 Januari 2018.

---

<sup>16</sup> Nurshalikah Ani, nasional.republika.co.id "*Mungkinkah Ada Wajib Militer di Indonesia? Ini Kata Mayjen TNI*", Rabu, 17 Mei 2017, 13:54, di akses pada Sabtu, 09 September 2017, 01.44.



Organisasi JATMAN adalah badan otonom dari organisasi Islam Nahdlotul Ulama yang mana di dalamnya (anggotanya) adalah para ahli thoriqoh, sebelumnya adalah JATM (Jamiyah Ahli Thoriqoh al-Mukatabaroh) saja tidak terdapat an-Nahdhiyah, namun seiring berjalannya waktu JATM berganti nama menjadi JATMAN. Seperti yang di katakan oleh KH. Wafiudin Sakam selaku Ketua Wilayah DKI Jakarta, “JATMAN adalah sebuah organisasi tarekat, sehingga yang punya massa adalah tarekat-tarekat<sup>17</sup>”, sekarang KH. Wafiudin Sakam di amanahi menjadi Mudir ‘Aam.

JATMAN sebagai wadah pengamal ajaran Thariqoh al Mu’tabarroh, yang merupakan salah satu pilar ajaran islam ala *Ahlus Sunnah Wal Jama’ah* (Aswaja) yang telah dirintis dan dikembangkan oleh para salafus sholihin, yang bersumber dari Rosullulloh, Malaikat Jibril atas petunjuk Allah SWT dengan sanad muttasil<sup>18</sup>, sanad muttasil adalah sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW.

Dengan diadakannya konferensi ulama internasional oleh JATMAN tersebut, Menurut Dr. Hamdani selaku pengurus dari JATMAN sangat mengapresiasi adanya konferensi ulama internasional yang digagas oleh Habib Muhammad Luthfi bin Yahya (Ra’is Aam JATMAN) “saya pikir ini adalah sejarah, sehingga thariqoh tidak hanya dikonotasikan sebagai orang-orang ahli dzikir, tetapi juga memiliki komitmen nasionalisme, bahkan ini mendunia, dengan acara konferensi internasional ulama

---

<sup>17</sup> Alawi Abdulloh, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) “Kiai Wahfiudin Kembali Ditetapkan Menjadi Ketua JATMAN Jakarta”, Senin, 23 Januari 2017, 12.01, diakses pada Senin, 11 September 2017, 10.49.

<sup>18</sup> Sukma Ahmad & Ainun Yatimul, [www.timesindonesia.co.id](http://www.timesindonesia.co.id) “Ulama Thariqoh memiliki Komitmen Nasionalisme”, Selasa, 26 Juli 2016, 20.15, diakses pada Senin, 11 September 2017, 13.43.

Thariqoh sedunia ini, menunjukkan bahwa ahli thariqoh itu juga berkontribusi kepada dunia dalam hal peradaban dan kemanusiaan yang berdasarkan atas perdamaian dunia<sup>19</sup>”.

Pada tahun 2016 silam, JATMAN telah mengadakan 2 kali Konferensi Ulama Internasional, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli, (1) Pertama, Konferensi Ulama Internasional Pertama yang dilaksanakan pada 15 Januari 2016 membuahkan hasil yaitu 9 Konsensus Bela Negara dan ditandatangani oleh para ulama, 1. Habib Muhammad Luthfi Bin Yahya (Indonesia), 2. Dr. Syekh Muhammad Adnan Al-Afiyuni (Suriah), 3. Dr. Syekh Aziz al-Idrisi (Maroko), 4. Prof. Dr. Syekh Muhammad Fadhil al-Jailany (Turki). 5. Habib Zaid bin Abdurahman bin Yahya (Yaman). 6. Dr. Syaikh Aziz Abidin (USA), 7. Syekh ‘Aun Mu’in al-Quddumi (Yordania)<sup>20</sup>. (2) Kedua, Konferensi Ulama Internasional kedua yang dilaksanakan pada 27-29 Juli 2017 membuahkan hasil 15 konsensus dan 15 konsensus tersebut dibacakan oleh ulama asal Syiria Syekh Muhammad Adnan al-Afiyuni selaku ulama yang menjadi Mufti di Damaskus<sup>21</sup>,

Dengan adanya JATMAN (Jam'iyah Ahli Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdiyyah) mengadakan kegiatan Mukhtar JATMAN dan konferensi ulama internasional dengan mengambil tema-tema yang berkaitan dengan Nasionalisme

---

<sup>19</sup> Ibid,

<sup>20</sup> Mega Dhian & Wicaksono Rhony, [www.timesindonesia.co.id](http://www.timesindonesia.co.id) “Para Ulama Internasional Sepakati Konsensus Bela Negara”, Sabtu, 16 Januari 2017, 22.37. diakses pada Senin, 11 September 2017, 11.32.

<sup>21</sup> Muiz Abdul & Fathony, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) “Ini 15 Konsensus Hasil Konferensi Ulama Internasional Bela Negara” Jum’at, 29 Juli 2017, 23.51 diakses pada Senin, 11 September 2017, 11.38.

tersebut sehingga melatar belakangi saya untuk melakukan penyusunan skripsi dengan Judul “Paradigma Pemikiran Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Muktabarrah An-Nahdiyyah (JATMAN) Tentang Nasionalisme” karena nasionalisme sangat berperan penting terhadap kemajuan Negara Indonesia.

Selain mengadakan konferensi ulama internasional dengan mengangkat tema kebangsaan, Habib Lutfi Bin Yahya juga memberikan pesan penting di hadapan para mursyid thariqoh dan tamu undangan dalam pembukaan Muktamar JATMAN XII di pendopo kabupaten Pekalongan pada 15 Januari 2018, salah satunya adalah “NKRI Harga Mati” merupakan pendirian dan kesepakatan Jam’iyah Ahlith Thariqoh al-Muktabarrah an-Nahdiyyah (JATMAN)<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup><http://pustakamuhibbin.club>, “Pesan Penting Habib Luthfi Bin Yahya dalam Pembukaan Muktamar JATMAN XII” Senin, 15 Januari 2018, 12:46, diakses pada Sabtu, 27 Januari 2018 16:20.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat saya ambil perumusan masalahnya, yaitu:

- Bagaimana Paradigma Pemikiran Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Muktabarrah An-nahdiyyah (JATMAN) tentang Nasionalisme atau cinta tanah air?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan disusunnya penelitian ini adalah untuk mengetahui Paradigma Pemikiran Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Muktabarrah An-nahdiyyah (JATMAN) terhadap Nasionalisme Indonesia.

### 1.3.2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian dan skripsi dengan judul Paradigma Pemikiran Jam'iyah Ahlith Thariqah Al-Muktabarrah An-Nahdiyyah (JATMAN) tentang Nasionalisme”, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai sarana informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya jiwa Nasionalisme terhadap para pembaca.
2. Memberikan informasi bagi para pembaca terutama para akademisi yang ingin merujuk teori nasionalisme sebagai referensi dalam pembuatan tugas pembelajaran ataupun tugas akhir.
3. Sebagai sarana informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama di masa yang akan datang.
4. Memberikan pengetahuan bagi warga negara indonesia pada umumnya dan para warga negara ataupun organisasi-organisasi yang ingin melakukan makar terhadap negara indonesia pada khususnya, sehingga warga negara Indonesia memiliki persepsi makna Nasionalisme yang sesungguhnya.

## 1.4 Kerangka Dasar Teori

### a. Konsep tentang Paradigma Pemikiran

Konsep mengenai paradigma dan pemikiran sebenarnya mempunyai hasil yang sama yaitu berkaitan dengan pikiran, konsep paradigma menurut KBBI yang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai 3 konsep 1. Daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugfasi dan deklinasi kata tersebut; 2. Model dalam teori ilmu pengetahuan; 3. Kerangka berpikir<sup>23</sup>.

Sedangkan pemikiran memiliki akar kata “pikir” yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan, kemudian menjadi kata benda kerja dengan mendapat imbuhan *pe* dan *an*, pemikiran adalah cara atau hasil pikir<sup>24</sup>.

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa Paradigma Pemikiran adalah sebuah model kerangka berfikir terhadap suatu ilmu pengetahuan yang memiliki cara atau hasil pikir tersendiri.

### b. Konsep tentang Pemikiran Politik

Pemikiran Politik terdiri dari dua suku kata, yakni Pemikiran dan Politik. Pemikiran sendiri memiliki akar kata “pikir” yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan, kemudian menjadi kata benda kerja dengan mendapat imbuhan *pe* dan *an*, pemikiran adalah cara atau hasil pikir<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> [www.kbbi.kemdikbud.go.id](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id), “Paradigma”, di akses pada 27 Februari 2018, 11.32 wib.

<sup>24</sup> Setyawan Adi, “*skripsi Analisis Wacana Pemikiran Politik Tan Malaka Pada Buku Massa Karya Tan Malaka*” Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2017, hal. 9.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 9.

Sedangkan kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *politikos* (menyangkut warga negara), secara etimologis kata politik berarti *polites* (seorang warga negara), *polis* (kota, negara), *politea* (kewargaan). Politik juga berarti ilmu, pengetahuan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tatacara pemerintahan, dsb), segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dsb), mengenai pemerintahan sesuatu Negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat kelicikan akal (daya upaya)<sup>26</sup>.

Menurut Dr. Tijani Abd. Qadir Hamid mendefinisikan pemikiran politik yaitu dengan melihat masalah-masalah dan topik-topiknya, yaitu macam pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat politik<sup>27</sup>.

Menurut uraian diatas dapat kami simpulkan bahwa Pemikiran Politik adalah sebuah hasil pikir yang berkaitan dengan permasalahan kenegaraan atau yang berkaitan dengan kenegaraan seperti warga negara, kebijakan, dsb. yang mana hasil pikir tersebut merupakan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

### **c. Konsep tentang Politik Islam**

Menurut Soeharto dalam modul pembelajaran Sosiologi Politik, mengutip dari Prof. Mirriam Budiarto menjelaskan bahwa politik merupakan “konsep-konsep pokok mengenai politik adalah negara (*state*), kekuasaan

---

<sup>26</sup> Ibid, hal 10.

<sup>27</sup> Hamid Tijani Abdul Qadir, “*Pemikiran Politik Dalam Al-Qur’an*”, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 3

(*power*), pengambilan keputusan (*decisison making*), kebijaksanaan (*policys beleid*), dan pembagian (*distribution*), atau alokasi (*allocation*)<sup>28</sup>.

Selain itu masih dalam buku yang sama Prof. Mirriam budiarjo menjelaskan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksnaakan tujuan-tujuan itu yang didalamnya terdapat proses pengambilan keputusan”<sup>29</sup>

Sedangkan menurut A.P Cowic. “politik (*politic*) menurut bahasa inggris dalam kosakata mempunyai arti *acting or judging wisely, well judged, prudent.*; bijaksana atau dengan bijaksana”<sup>30</sup>. Kata istilah politik sendiri dipakai sebagai konsep mengatur masyarakat menuju masyarakat politik yang lebih baik, sebagaimana yang termuat dalam buku Plato, *Republic*, dan Aristoteles<sup>31</sup>.

Agama Islam dalam pengertian Arab disebut Dinul Islam. Kata *Islam* berasal dari kata kerja *aslama* yang artinya menyerah, tunduk atau patuh. Dari asal kata *aslama* ini diderivasikan menjadi beberapa arti yaitu *salam* artinya keselamatan, *taslim* artinya penyerahan, *salam* artinya memelihara, *sullami* artinya titian dan *silm* artinya perdamaian<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Soeharto, “*Sosiologi Politik*”, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2016, hal. 3

<sup>29</sup> Soeharto, *Ibid*, hal. 3.

<sup>30</sup> Junaidi , “*Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Ghozali Tentang Etika Politik (Skripsi)*”, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2013, hal. 15.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>32</sup> Djaelani Bisri M, “*Islam Rahmatan Lil ‘Alamin*”, Warta Pustaka, Yogyakarta, 2005, hal. 27



Seperti pemikiran loka karya Muhammad Nuh, “dalam Islam, damai bukanlah masalah *international law* (hukum internasional) dan *international relations* (hubungan internasional) antar negara-negara yang kemudian melahirkan Negara *super power* yang arogan kemudian mengklaim diri sebagai polisi dunia, melainkan dimulai dari konsep diri, kemudian meluas ke keluarga, masyarakat, bangsa dan dunia”

Islam memang cinta damai dan merupakan Agama damai. Islam selalu mengajak umatnya untuk bekerjasama dengan umat lain dimanapun berada<sup>33</sup>. Sifat asli manusia adalah fitrah. Demikian juga islam dikatakan sebagai agama *fitroh*, karena semua peraturanya serasi dan sesuai dengan perangai hidup yang dimiliki oleh manusia. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan hati nurani manusia yang ingin hidup stabil damai tentram lahir dan bathin. Untuk mencapai tujuan tersebut, Agama Islam berperan untuk menyadarkan manusia agar mengenal dirinya, islam menyadarkan manusia dengan penciptanya<sup>34</sup>. Sebagaimana kita ketahui dalam syari’at Islam, ada dua bentuk hubungan, yaitu ibadah dan mu’amalah<sup>35</sup>.

Mu’amalah adalah hubungan antar sesama manusia atau *hablum minannas*. Semua manusia diciptakan dari satu asal yang sama. Tidak ada kelebihan yang satu dari yang lainnya, kecuali yang paling baik dalam

---

<sup>33</sup> Nuh Muhammad, “*Islam, Nilai Social dan Kebangsaan Di Indonesia*”, Universitas Wahid Hasyim Press, Semarang, 2008, hal. 213.

<sup>34</sup> Djaelani Bisri M, *Op. Cit.* hal. 56.

<sup>35</sup> Djaelani Bisri M, *Op. Cit.* hal. 52.

menunaikan fungsinya sebagai kholifah tuhan dibumi, yang taqwa kepada Alloh SWT<sup>36</sup>.

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكروانثي وجعلناكم شعوباوقبايل لتعارفوا<sup>ان</sup> اكرمكم عندالله اتقاكم<sup>ان</sup>  
(الحجرات:13) الله عليم خبير\*

(*ya ayyuha an-naasu innaa kholqnaakum min dzakari wa untsa wa ja'alnakum syu'ubaa wa qobailaa li ta'arofuu\* inna akromakum 'indallohi atqokum\*innaloha 'alimun khobir*)

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Alloh adalah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti” (Qs. Al hujuraat: 13)<sup>37</sup>.

Oleh karena itu dapat kami simpulkan bahwa politik islam mengarah kepada tujuan hubungan antar sesama manusia dan masyarakat. Semua konsep kemasyarakatan yang ada dimaksudkan menjadi contoh bagi seluruh manusia dalam menciptakan peraturan-peraturan baru demi kebaikan dan perdamaian manusia itu sendiri.

---

<sup>36</sup> Djaelani Bisri M, *Op. Cit.* hal. 53.

<sup>37</sup> Al Qur'an Qs. Al-Hujuraat: 13

#### d. Konsep Tentang Nasionalisme

Nasionalisme Menurut Soekarno yang mengutip dari pendapat **Ernest Renan**, nasionalisme “adalah merupakan unsur yang dominan dalam kehidupan sosial politik sekelompok manusia dan telah mendorong terbentuknya suatu bangsa atau *nation* guna menyatukan kehendak untuk bersatu” maksudnya adalah semangat nasionalisme merupakan semangat kelompok manusia yang hendak membangun suatu bangsa yang mandiri, dilandasi satu jiwa dan kesetiakawanan yang besar, mempunyai kehendak untuk bersatu dan terus menerus ditingkatkan untuk bersatu, dan menciptakan keadilan dan kebersamaan<sup>38</sup>.

Sedangkan menurut Haris Maulana “nasionalisme adalah perasaan bangga akan bangsa sendiri yang berasal dari dalam jiwa, tidak dibuat-buat atau sekedar ikut-ikutan<sup>39</sup>.”

Di era globalisasi semangat nasionalisme sangat di perlukan, karena jika semangat nasionalisme tidak di bangun di dalam masyarakat, maka Negara Indonesia akan kembali di jajah dengan bentuk penjajahan yang baru (neo-kolonialisme), baik penjajahan secara ekonomi ataupun penjajahan secara ideologi, seperti pendapat Riri Satria dalam buku Anak Bangsa Menggugat, menyatakan bahwa:

---

<sup>38</sup> Dault Adhyaksa, “*Islam dan Nasionalisme*”, PUSTAKA AL KAUTSAR, Jakarta, 2005 hal. 2 & 3.

<sup>39</sup> Sigit Giri Wibowo, “*cinta Indonesia setengah/kompasiana*”, Benteng Pustaka, Yogyakarta, 2013, hal 21.

nasionalisme tidak dapat diartikan secara sempit, nasionalisme harus di definisikan sebagai upaya membangun keunggulan kompetitif, dan tidak lagi di definisikan sebagai upaya untuk membuat kita menutup diri daripihak asing seperti proteksi atau semangat anti berbau asing, profesionalisme adalah salah satu kata kunci dalam upaya mendefinisikan makna nasionalisme saat ini, dengan demikian nasionalisme harus di lengkapi dengan sikap profesionalisme<sup>40</sup>.

Dengan kata lain, peneliti menginterpretasikan maksud dari pendapat Riri Satria, yang menyatakan Nasionalisme adalah Profesionalisme, yaitu dengan cara menjadikan masyarakat yang madani, masyarakat cerdas dan memiliki etos kerja yang baik, dalam hal ideologi misalnya bentuk profesionalisme (nasionalisme) adalah dengan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.

Apalagi sekarang Negara Indonesia termasuk ke dalam anggota Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Profesionalitas kita harus mampu berkompetitif dengan pertarungan ekonomi dari luar, “nasionalisme ekonomi harus kita pertahankan untuk dapat terselenggaranya demokrasi ekonomi...

---

<sup>40</sup> Swasono Sri Edi & Satria Riri, *“Anak Bangsa Menggugat, Nasionalisme sebagai Antitesis Globalisasi”*, LP3ES, Jakarta, 2003, hal 72.

rakyat akan terposisikan sebagai subjek dan asset pembangunan nasional, bukan sebagai beban”<sup>41</sup>.

Sedangkan Nasionalisme menurut Habib Luthfi Bin Yahya ialah: “Nasionalisme adalah membangun jiwa rasa memiliki “*Handarbeni*” di semua lini dan semua yang dimiliki oleh Negara Indonesia”, Habib Luthfi Bin Yahya Mencontohkan bentuk Nasionalisme *Handarbeni* mengganti penamaan yang berasal dari luar Indonesia diganti dengan penamaan dari Indonesia, misal: Jambu Bangkok diganti saja Jambu Semarang (atau dari daerah dimana Jambu itu berbuah), karena jika hal itu disepelekan maka cirri khas atau keunggulan yang dimiliki Indonesia yang mampu berkompetitif di era globalisasi ini maka akan kalah, karena secara tidak langsung telah mengklaim hasil bumi atau kepemilikan dari pihak asing.

**e. Konsep tentang JATMAN**

JATMAN (Jamiyah Thoriqoh Al Mu'tabaroh an-Nahdhiyah) adalah sebuah organisasi tarekat, sehingga yang punya massa adalah tarekat-tarekat. Thoriqoh (tarekat) adalah suatu kelompok organisasi yang melakukan amalan-amalan zikir tertentu, dan menyampaikan suatu sumpah yang formulanya telah ditentukan oleh pimpinan organisasi tarekat tersebut<sup>42</sup>. Selain itu tarekat berarti jalan atau cara untuk mencapai tingkatan-tingkatan (maqamat) untuk

---

<sup>41</sup> Edi Swasono Sri, “*Anak Bangsa Menggugat, Pengantar: Nasionalisme, Retorika adalah Sukma dari Realita*”, LP3ES, Jakarta, 2003, hal xiii-xiv.

<sup>42</sup> Mulyati Sri, “*Tarekat-Tarekat Muktabaroh Di Indonesia*”, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 9.

mendekatkan diri kepada Tuhan<sup>43</sup>. Tarekat Muktabaroh adalah tarekat yang mutashil (tersambung) sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW, jadi JATMAN adalah sebuah perkumpulan tarekat-tarekat yang mana tarekat tersebut tarekat yang mutashil (tersambung) sanadnya kepada nabi Muhammad SAW. Yang lahir dari rahim Nahdlotul Ulama (NU), meskipun sejatinya amalan-amalan tarekat telah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW.<sup>44</sup>

An nahdiyah adalah berasal dari kata nahdhiyin, sedangkan nahdhiyin atau lebih tepatnya adalah nahdlotul ulama (NU), jadi JATMAN merupakan badan otonom dari organisasi NU.

#### **f. Konsep Tentang Negara**

Dalam hal ini konsep negara terbagi menjadi dua bagian 1. Definisi Negara Dalam Konsep Barat, 2. Definisi Negara Dalam Konsep Islam.

##### **1. Definisi Negara dalam Konsep Barat**

- a. Kranenburg: menurut kranenburg dalam bukunya *algemeine staatslehre* kranenburg merumuskan arti “Negara sebagai suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan/bangsanya sendiri”.
- b. Aristoteles: menurut Aristoteles di dalam bukunya “*Politicia*”, “negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup

---

<sup>43</sup> Red, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) “*Tariqoh Al Mu’tabaroh Dari Waktu Ke Waktu*” Kamis, 31 Maret 2005, 10.22, diakses pada Sabtu, 11 November 2017, 23.45.

<sup>44</sup> Red, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) “*Tariqoh Al Mu’tabaroh Dari Waktu Ke Waktu*” Kamis, 31 Maret 2005 10.22, diakses pada Sabtu, 11 November 2017, 23.45.

yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan Negara (*ecclesia*). Yang dimaksud negara hukum ialah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya”<sup>45</sup>.

- c. Robert M. Mac Iver: menurut Robert M. Mac Iver “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa”<sup>46</sup>.

## 2. Definisi Negara dalam Konsep Islam

- a. Daulah: istilah *daulah* berasal dari bahasa arab yakni *daulah*; kata dari *dala-yadulu-daulah* = bergilir, beredar dan berputar (*rotate, alternate, take turns, or occur periodically*). Kata ini dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan<sup>47</sup>.
- b. Khilafah: istilah khilafah mengandung arti “perwakilan”, “pergantian”, atau “jabatan kholifah”. Istilah ini berasal dari kata arab, “*khalf*” yang berarti “wakil”, “pengganti” dan “penguasa”. Menurut Bernard Lewis, istilah *khalifa* pertama kali muncul di Arabia pra-islam dalam suatu

---

<sup>45</sup> Huda Ni'matul, “*Ilmu Negara*” PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014 hal 8.

<sup>46</sup> Huda Ni'matul, *Ibid*, hal 12.

<sup>47</sup> Huda Ni'matul, *Ibid*, hal 13.

prasasti arab abad ke-6 Masehi. Disitu *khalifa* tampaknya menunjuk kepada semacam raja muda atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan yang berada di tempat lain. Sedangkan dalam islam, istilah ini pertama kali digunakan ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad. Dalam pidato inagurasinya, abu bakar menyebut dirinya sebagai “Khalifah Rosul Alloh” dalam pengertian “Pengganti Rosulluloh”, karena itu, istilah tersebut menurut Aziz Ahmad, sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas kenabian yang meneruskan misi-misi rasul”<sup>48</sup>.

#### **g. Paradigma Hubungan Agama (Islam) dan Negara**

Dari sekian panjang perjalanan Negara Indonesia serta banyaknya pendapat-pendapat tentang hubungan Agama dan Negara, maka dapat di bagi kedalam 3 golongan paradigma hubungan Agama dan Negara yakni : Paradigma Integralistik, Paradigma Sekuleristik dan Paradigma Simbiotik.

##### **a. Paradigma Integralistik**

Paradigma integralistik adalah hubungan antara Agama dan Negara untuk menjadi satu seperti pendapat M. Natsir dalam bukunya “Agama dan Negara dalam perspektif Islam” mengatakan : “bagi kita kaum muslimin Negara bukan suatu badan tersendiri yang menjadi tujuan. Dan dengan persatuan

---

<sup>48</sup> Huda Ni'matul, Ibid, hal 15.



Agama dengan Negara kita maksudkan, bukanlah Agama itu, cukup sekedar dimasuk-masukan saja disana sini kepada Negara itu, bukan begitu!

Negara, bagi kita bukan tujuan tetapi alat urusan kenegaraan pada pokok dan pada dasarnya adalah satu bagian yang tak dapat dipisahkan, satu *intergereerende deel* dari Islam, yang menjadi tujuan ialah: kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan peri kehidupan manusia sendiri, (sebagai individu”, ataupun sebagai anggota dari masyarakat baik yang berkenaan dengan kehidupan dunia yang fana ini, ataupun yang berhubungan dengan kehidupan kelak di alam baka<sup>49</sup> .

Selanjutnya di dalam bukunya Zudi Setiawan juga mengutip pendapat tersebut dengan menambah penjelasan bahwasanya “dalam sebuah pidatonya, Muhammad Natsir secara tegas menyatakan bahwa Dasar Negara Indonesia hanya memiliki dua macam pilihan, yaitu Sekulerisme atau paham Agama (Islamisme), Natsir pun dengan tegas memilih islam sebagai Dasar Negara bagi Indonesia”, “ada dua alasan yang mendasari pilihan natsir tersebut yakni pertama, bahwa Islam sebagai Agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia telah mengkara secara kuat dalam masyarakat, sehingga punya alasan kuat untuk dijadikan sebagai dasar negara. Kedua, bahwa ajaran Islam mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan kenegaraan dan

---

<sup>49</sup> Natsir M, “*Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*”, Media Dakwah, Jakarta, 2001 hal. 82.

kemasyarakatan yang *plural*, karena Islam merupakan Agama yang mengajarkan tentang toleransi<sup>50</sup>.

b. Paradigma Sekuleristik

Paradigma sekuleristik adalah sebuah hubungan yang memisahkan antara Agama dan Negara, seperti Mustofa Kemal Attaturk yang memisahkan antara Agama dan Negara, bahkan Ir. Soekarno sangat mengagumi pemikiran dari Mustofa Kemal Attaturk, di buktikan dengan pernyataan Soekarno “Agama dijadikan urusan perorangan. Bukan Islam dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri dan tidak kepada Negara. Maka oleh karena itu, salahlah kita kalau kita mengatakan bahwa Turki adalah anti Agama, anti Islam, salahlah kita kalau kita samakan Turki itu dengan misalnya Rusia”<sup>51</sup>.

Menurut Husaini Adian tentang sekularisasi dan liberalisasi Islam yang di kutip oleh Zudi Setiawan “urusan Agama diserahkan kepada individu pemeluknya dan menjadi urusan pribadi. Agama tidak dijadikan sebagai urusan Negara, sehingga tidak ada Agama resmi Negara”<sup>52</sup>.

c. Paradigma Simbiotik.

Paradigma Simbiotik adalah hubungan yang saling menguntungkan antara Agama dan Negara, yakni tidak bersifat integralistik dan tidak pula sekuleristik. Seperti pernyataan Prof. Dr. Nurcholis Madjid “bahwa umat Islam

---

<sup>50</sup> Setiawan Zudi, “*Nasionalisme NU*”, CV Aneka Ilmu, Semarang, 2007, hal. 53.

<sup>51</sup> Setiawan Zudi, *Ibid*, hal. 56.

<sup>52</sup> Setiawan Zudi, *Ibid*, hal. 56.

tidak perlu menuntut Negara atau pemerintah menjadi Negara atau Pemerintah Islam. Baginya, yang penting adalah isi atau substansi dari ajaran Islam, bukan bentuk formalnya<sup>53</sup>.

Seperti pendapat KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) “Agama itu kekuatan inspiratif, kekuatan moral. Jadi agama hanya membentuk etika dari masyarakat. Itu yang penting, menurut saya. Lebih dari itu menimbulkan problem. ketika kita membentuk etika masyarakat, maka Agama itu sendiri merumuskan masa depan masyarakat itu seperti apa yang diinginkan, dengan menilai situasi masyarakat pada saat itu bagaimana. Karena itu, selalu berangkat dari kenyataan-kenyataan”<sup>54</sup>.

Jika kita kaitkan pendapat Nurcholis Madjid dengan pendapat (Gus Dur) maka dapat saya simpulkan sebagai berikut substansi dari Agama adalah etika.

#### **h. Konsep Tentang Bela Negara**

Mengingat banyaknya Warga Negara Indonesia yang mencapai sekitar 260 juta jiwa dengan beraneka ragam perbedaan dari perbedaan Agama, Suku dan Bahasa, Negara Indonesia dalam menyelenggarakan HanKamNas (Pertahan Keamanan Nasional) warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dan dijamin oleh UUD 1945, salah satunya dengan Bela

---

<sup>53</sup> Setiawan Zudi, Ibid, hal. 59.

<sup>54</sup> Setiawan Zudi, Ibid, hal. 62.

negara, berbicara mengenai bela negara terdapat tiga point yaitu 1. Makna Bela Negara, 2. Pendidikan Bela Negara, dan 3. Implementasi Bela Negara.

1. adapun makna Bela Negara sendiri adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan Negara (UU No. 3 Tahun 2002)<sup>55</sup>. Jika di ulaskan maka bela negara merupakan langkah suatu negara dalam melakukan pembangunan nasional dengan bentuk keikutsertaan seluruh rakyat secara fisik sishankamrata bukan dengan mempersenjatai seluruh rakyat secara fisik untuk mengadalan perlawanan fisik, melainkan merupakan keikutsertaan seluruh rakyat dalam upaya HamKanNeg (Pertahanan kemandirian negara/nasional) melalui bidang profesinya masing-masing.

2. Untuk memberikan nilai-nilai bela negara terhadap warga negara, perlu adanya Pendidikan Bela Negara. Pendidikan Bela Negara bisa di golongankan kedalam 3 kelompok lingkungan : 1). lingkungan pendidikan (*formal*), 2). lingkungan pekerjaan (*non formal*) dan 3). Lingkungan pemukiman (*informal*).

1). Pendidikan bela negara dilakukan pada lingkungan *formal* yaitu membentuk peserta didik agar sadar akan perannya sebagai tunas bangsa dan kader bangsa dimasa mendatang, mengenal dan mencintai tanah air,

---

<sup>55</sup> Subagyo, dkk, "Pendidikan Kewarganegaraan", UPT UNNES PRESS, Semarang, 2009, hal 37.

rela membela kehormatan martabat bangsa dan negara, memiliki watak dan sikap kejuangan dan kesatria. Dalam pelaksanaannya lingkungan pendidikan (*formal*) dibagi menjadi dua tahap: 1) tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah dan pendidikan luar sekolah termasuk kepramukaan. 2) tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan pada tingkat perguruan tinggi.

2). Di dalam lingkungan pekerjaan (*nonformal*) yaitu dengan membentuk karyawan yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, memiliki motivasi kerja yang tinggi, memiliki disiplin dan produktivitas yang tinggi pula, sesuai dengan profesinya masing-masing.

3). Di dalam kehidupan atau lingkungan pemukiman (*informal*) yaitu dengan membentuk masyarakat yang dapat memahami nilai-nilai perjuangan bangsa mencintai tanah air dan rela berkorban serta mempunyai kemampuan awal bela negara, memiliki kesatuan dan persatuan bangsa yang diwujudkan dalam kehidupan secara gotong royong, sehat, bersih, tertib dan aman, pelestarian lingkungan disetiap pemukiman.

3. dari makna dan pendidikan pancasila maka sebagai bentuk aplikatif atau implementasinya yaitu di harapkan: 1) memiliki kemampuan awal belanegara secara *psikis* (mental) sehingga memiliki sifat-sifat seperti disiplin, ulet, kerja keras, taat peraturan perundang-undangan, than uji untuk mencapai tujuan nasional dan secara fisik (luar) kondisi kesehatan,

keterampilan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bela negara. 2) memiliki kerelaan berkorban untuk negara dan bangsa dalam perwujudannya adalah : a) rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan harta benda untuk kepentingan umum. b) siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara<sup>56</sup>.

Pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air (wilayah Nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara.<sup>57</sup>

Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Subagyo, dkk, Ibid, hal 40 & 41.

<sup>57</sup> Kaelan H. & Zubaidi Achmad, "Pendidikan Kewarganegaraan", Paradigma, Yogyakarta, 2007, hal 120.

<sup>58</sup> Kaelan H. & Zubaidi Achmad, Ibid, hal 120.

## 1.5 Metodologi Penelitian

Dalam hal apapun ketika kita akan melakukan suatu apapun kita harus merencanakan tindakan apa yang akan kita lakukan, serta dengan metode seperti apa akan kita lakukan hal tersebut, sehingga dalam melakukan penelitian ini peneliti juga menggunakan metode penelitian karena metode penelitian sangat membantu dan berarti bagi peneliti dalam melakukan analisis penelitian pada skripsi ini, yakni skripsi dengan judul “Paradigma Pemikiran Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Muktabarrag An-Nahdiyyah (JATMAN) Tentang Nasionalisme” Untuk itulah sekiranya sangat perlu peneliti untuk memaparkan jenis-jenis dan pendekatan penelitian berikut :

Adapun penulisan skripsi ini merupakan penelitian *mix research*, penelitian *mix research* adalah penggabungan antara penelitian kepustakaan/studi dokumenter (*library research*) dan penelitian di lapangan (*field research*), *library research* yaitu mengumpulkan data-data penelitian dari buku-buku, ensiklopedia, kamus, artikel maupun jurnal yang dipandang memiliki hubungan dengan tema dan judul penulisan skripsi ini<sup>59</sup>, sedangkan *field Research* yaitu pengumpulan data-data yang di lakukan terjun ke dalam lapangan secara langsung, termasuk dengan wawancara:

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat diskriptif dan cenderung menggunakan

---

<sup>59</sup> Junaidi , “*Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Ghozali Tentang Etika Politik (Skripsi)*”, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2013, hal 17.

analisis dengan pendekatan Deduktif. adapun sumber yang peneliti gunakan adalah berupa wawancara dengan pengurus Jam'iyah Ahlith Thariqah Al-Muktabarrah An-Nahdiyyah (JATMAN) serta buku Nasionalisme NU.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan dua sumber data. *Pertama*, Data Primer dan *kedua*, Data Sekunder. Data Primer adalah data-data yang bersifat mengikat<sup>60</sup>, adapun yang dimaksud dari data primer dalam pembuatan skripsi ini adalah berasal dari buku Nasionalisme NU karangan Zudi Setiawan serta hasil wawancara dengan beberapa pengurus JATMAN. Sedangkan sumber Data Sekunder adalah data-data pelengkap atau penunjang sehingga dapat membantu peneliti untuk menambah informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun data tersebut berasal dari internet, dokumen, buku-buku terkait dan sebagainya yang masih terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## 3. Metode pengumpulan data

Adapun data kajian pustakan yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan beberapa metode-metode yang umum dalam penelitian ini:

---

<sup>60</sup> Putra Wahyu Cahya, "Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Kota Semarang Tahun 2015" Skripsi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, hal 28.



a. Deskripsi

Suatu bentuk wacana yang berusaha untuk melukiskan atau menggambarkan dengan kata-kata, wujud atau sifat lahiriah dari suatu obyek. Penelitian menggunakan metode ini tentang “Paradigma Pemikiran Jam’iyyah Ahlith Thariqah Al-Muktabarrah An-Nahdiyyah (JATMAN) Tentang Nasionalisme”.

b. Induksi dan deduksi

Induksi adalah pengambilan keputusan secara umum dengan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari fakta-fakta khusus, Deduksi adalah pengambilan kesimpulan untuk suatu atau beberapa kasus khusus yang didasarkan kepada suatu fakta umum<sup>61</sup>.

c. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tehnik atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai (*informan*). Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik atau metode wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan

---

<sup>61</sup> Junaidi , “*Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Ghozali Tentang Etika Politik (Skripsi)*”, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2013.

untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai<sup>62</sup>.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan serta tersusun maka sebelum melakukan wawancara, pewawancara (peneliti) menyusun pertanyaan-pertanyaan secara sistematis dan telah disiapkan sebelumnya. Hal ini penting dilakukan agar pertanyaan yang diajukan tetap sesuai koridor dan fokus terhadap informasi yang dibutuhkan pewawancara atau tujuan penelitian. Selain itu terdapat 1 hal yang sangat penting yang dilakukan pewawancara atau peneliti dalam berwawancara yakni mengenai intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata dan kepekaan nonverbal<sup>63</sup>. hal ini sangat penting diperhatikan karena hal tersebut nantinya berkenaan dengan dapat diterimanya maksud atau isi dari pertanyaan yang kita ajukan serta menyangkut dengan jawaban atau informasi yang kita terima. Adapun narasumber atau informan yang menjadi sasaran wawancara yaitu: 1. Azmi Muttaqin, S.IP., M.Si selaku pengurus JATMAN Wilayah Jawa Tengah sebagai wakil bidang Lajnah Muwasollah (Hubungan Luar Negeri), 2. KH. Muhammad Masroni (selaku sekertaris JATMAN Jawa Tengah sekaligus pengasuh pondok pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang). 3. Drs. H Mahlail

---

<sup>62</sup> Noor Juliansyah, "*Metodologi Penelitian*", Prenadamedia Group, Jakarta, 2015. hal 138.

<sup>63</sup> Noor Juliansyah, *Ibid*, hal 139.

Syakur M.Ag selaku pengurus JATMAN wilayah Jawa Tengah. Ketiga narasumber merupakan pengurus JATMAN dan atau ulama nasional, yang mana hasil wawancara ketiga narasumber tersebut di gunakan sebagai bahan mengetahui arah Paradigma Pemikiran organisasi JATMAN tentang Nasionalisme serta nilai tambah terhadap deskripsi dari penelitian yang peneliti temukan dari data-data yang sudah ada.

d. Interpretasi

Melakukan pemahaman yang benar mengenai ekspresi manusia yang dipelajari. Dalam hal fakta atau produk itu dibaca sebagai suatu naskah<sup>64</sup>. Peneliti melakukan interpretasi dari temuan hasil penelitian dengan maksud untuk menjelaskan hasil penelitian dengan interpretasi penulis, serta interpretasi tersebut peneliti kaitkan dengan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti.

Demikian penjelasan mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan dalam proses skripsi ini, sebagai bentuk pertanggung jawaban secara ilmiah dan akademik.

---

<sup>64</sup> Junaidi , “*Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Ghozali Tentang Etika Politik (Skripsi)*”, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2013.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sistematika penulisan skripsi ini, adapun skripsi ini penulis membagi menjadi 4 bagian atau 4 BAB :

Bab Pertama, yakni memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Gambaran umum organisasi JATMAN (Jamiyah Ahli Thoriqoh al-Muktabaroh an-Nahdiyah).

Bab Ketiga, analisis pokok masalah yaitu memuat uraian pembahasan pokok masalah penelitian.

Bab Keempat, Penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari penelitian dan pembahasan untuk memperlihatkan intisari dari penjelasan analisa yang dilakukan oleh penulis. Saran merupakan dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis ditujukan pada para peneliti yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah penulis lakukan.